

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sikap organisasi atau institusi dipengaruhi oleh berbagai hal. Termasuk pemerintah Republik Indonesia sendiri. dalam bidang pariwisata menjadi konsen pengembangan yang dilakukan untuk bisa menambah devisa negara serta atau untuk memperoleh pendapatan negara yang semakin banyak. Tentunya masa covid-19 ini mempengaruhi banyak hal termasuk sektor pariwisata yang menyebabkan sepi pengunjung yang datang. Hal ini dikarenakan kebijakan internasional yang membatasi kegiatan warga negaranya untuk berkegiatan.

Untuk Indonesia sendiri memiliki banyak regulasi yang pernah dijalankan, adanya covid-19 yang dimana adanya keringanan dalam berkegiatan, pada April tahun 2020 dilaksanakan yang namanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) melalui permenkes (peraturan menteri kesehatan) no 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19. Kemudian adanya tindak lanjut dari aturan tersebut namun hanya membatasi pulau Jawa dan Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Terus adanya perubahan kembali menjadi PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro yang berskala mikro pada bulan Februari 2021. Hal ini berkaitan dengan penentuan kelas-kelas kondisi daerah seperti WFH 75% dinyatakan sebagai zona merah dan lainnya. Selanjutnya terjadi perubahan kembali menjadi PPKM Darurat, hal ini dikarena pada saat itu melonjaknya kasus

Covid-19. Dan terakhir adanya perubahan menjadi PPKM dengan menggunakan skema level 3-4. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021. (Detikcom, 2021)

Sektor pariwisata dalam suatu pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjadi sektor yang strategis untuk dikembangkan suatu pemerintahan. Perkembangan dalam sektor pariwisata banyak mendorong sektor lainnya seperti ekonomi, budaya, bahkan politik. Sektor pariwisata Jadi pengembangan terkait pariwisata ini memang sangat di membantu dalam pertumbuhan perekonomian negara, bahkan untuk indonesia sendiri sektor kreatif dan pariwisata menjadi penyumbang terbesar devisa negara (Yanwardhana, 2021). Hal ini menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan.

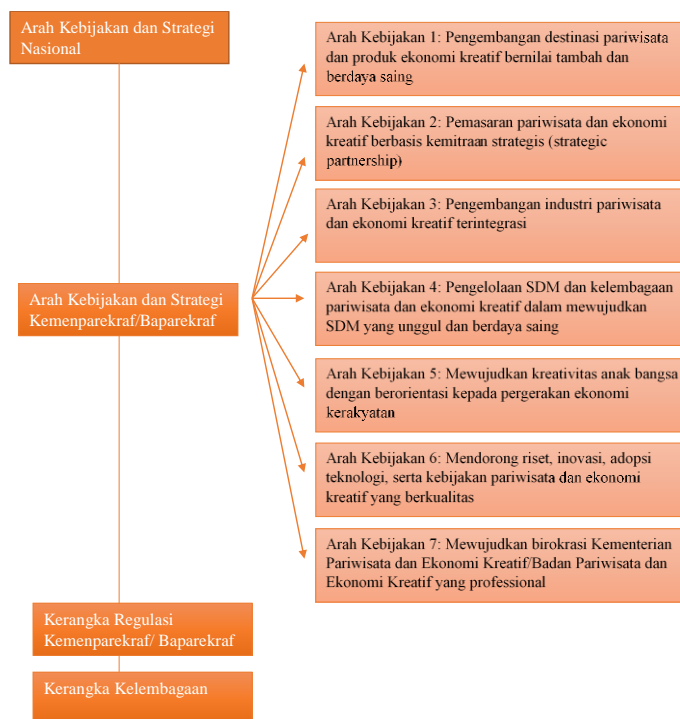
Dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam hal ini pastinya memiliki kebijakan yang dikeluarkan untuk menggerakkannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) pada Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni dijelaskan mengenai kebijakan itu sendiri yaitu:

*“Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah
untuk mencapai tujuan”*

Dalam aturan di atas jelas bahwa kebijakan bersifat untuk mendapatkan tujuan yang akan di raih.

Kebijakan pariwisata indonesia sendiri berada dalam urutan ke 2(dua) dalam prioritas dalam sektor unggulan pembangunan pada masa periode tahun 2018 (Thaib, 2018). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk bisa mengembangkan kepariwisataan. Dalam buku Rencana Strategis Kementerian Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 disana dijelaskan rencana strategis untuk arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan pemerintah untuk sektor pariwisata yang mencakup 4 (empat) poin yang 7 (tujuh) sub poin. Diantaranya adalah:

Gambar 1. Rencana strategis untuk arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan pemerintah sektor pariwisata 2020-2024



Sumber: Buku Rencana Strategis Kementerian Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024,

di olah peneliti

Dalam beberapa poin di atas tentunya yang akan memberikan arah kebijakan pariwisata nasional bergerak nantinya.

Beberapa kebijakan pemerintah pusat yang telah dikeluarkan terkait sektor pariwisata antara lain:

- Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah untuk Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Siaran, 2021)
- Pada tahun 2021, terjadi kenaikan jumlah bantuan dana hibah pariwisata menjadi 3,7 triliun rupiah untuk membantu pemda serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Siaran, 2021)
- Peluncuran program Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) (Ary, 2021)
- Program digitalisasi pariwisata yang dikeluarkan Menparekraf adalah “Go Mandalika” (Dariwardani, 2021)

Kabupaten Lombok Tengah sendiri terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pulau Lombok, yang mana memiliki banyak spot pariwisata alam maupun budaya. Maka perlu dirumuskan kebijakan yang tepat untuk bisa mengelola pariwisata tersebut. Mengingat masa pandemi sudah dinyatakan sebagai masa transisi menuju endemi. Maka perilaku pemerintah daerah ini pastinya memiliki sikap yang berbeda dalam mengelola pariwisatanya. Hal inilah yang menjadi penting untuk dikaji serta diamati sehingga dapat dipahami perubahan perilaku yang terjadi. Apalagi baru ini

pemerintah kabupaten sendiri mengeluarkan kebijakan serta pengelolaan wisata yang ada di kab Lombok Tengah mengenai pengembangan salah satu pariwisatanya yakni Sapana Lembah Paradise (Tengah, 2022). Hal ini sebagai gambaran umum kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten dalam pariwisata yang mana bisa menjadi sub bagian dalam menilai perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi covid-19 yang melanda daerahnya apalagi kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2022 yang mana telah masuk dalam masa transisi pandemi Covid-19, tentunya dengan mempertimbangkan pandemi yang terjadi.

Beberapa kebijakan pariwisata pemerintah kabupaten Lombok Tengah

- Menggandeng NGO serta membuatkan regulasi yang baik dalam membantu pariwisata daerah (Rosidi, 2022b)
- *Travel pattern* dalam KEK Mandalika (Rosidi, 2022)

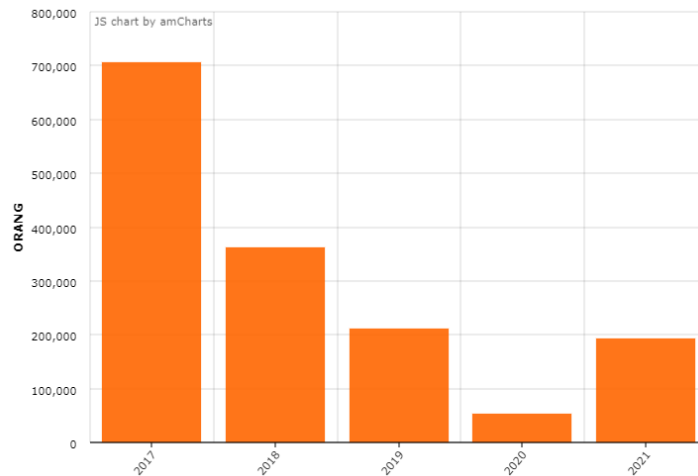
Kebijakan dinas di atas juga di tunjang dengan adanya peraturan Bupati Lombok Tengah No 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mengenai perencanaan, pengendalian, penyelenggaraan urusan kepariwisataan. Kebijakan di atas merupakan bentuk implementasi peraturan bupati dalam meningkatkan atau memperbaiki pariwisata yang ada.

Spot pariwisata yang ada di kabupaten Lombok Tengah di antaranya Desa Sade, Kuta Mandalika, Pantaian, Pantai Selong Belanak, Pantai Mawun, Bukit Pantai Merese, Air Terjun Benang Kelambu, dan yang terbaru sekarang ini adalah Sirkuit Mandalika. Sama dengan pengembangan Sirkuit Mandalika ini yang awalnya hanya

berupa wisata pantai Kuta Mandalika. Kebijakan yang pemerintah pusat menjadi pembangunan super prioritas. Maka perlu suatu penanganan yang baik dalam mengelola pariwisata yang ada. Maka dari itu fungsi pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu untuk dijalankan.

Pariwisata di Lombok Tengah sendiri banyak mengalami gejala perubahan jumlah penunjung. Hal yang demikian sendiri banyak di pengaruhi oleh kebijakan yang ada pada pemerintah kabupaten terkait. Mudah atau sulitnya akses fasilitas maupun transfortasi yang memudahkan para pengunjung untuk bisa pergi kesana. Kemudian tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Gambar 2 Jumlah pengunjung pariwisata Lombok Tengah 2017-2021

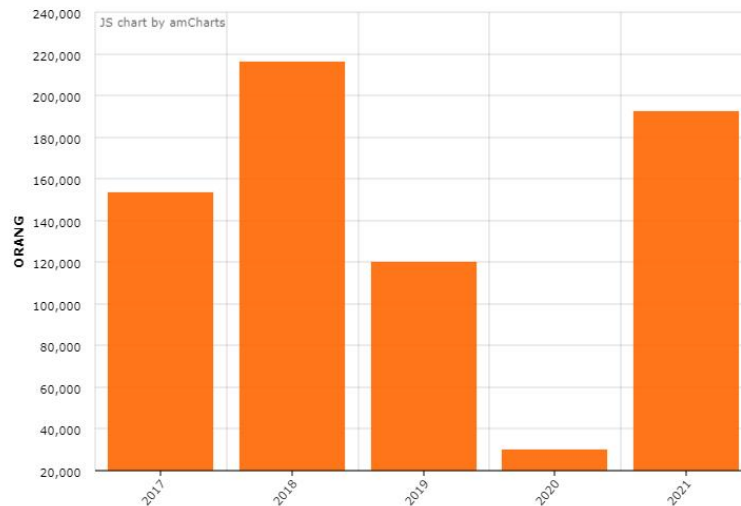


Sumber: Data BPS, diambil dari website pemerintah kabupaten Lombok Tengah

Bisa dilihat bahwa data yang di sampaikan di atas pada tahun 2017 yang mana sampai pada tahun 2019 yang merupakan awal adanya covid-19 yang terus menyusut

pada bahkan sampai pada bawah 100.000 orang, yang mana puncaknya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. Kemudian setelah adanya regulasi yang jelas pada tahun 2021 mengalami kenaikan cukup pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tinjau dari data di atas. Yakni terbukti dengan dikeluarkannya perpres dan perubahan yakni Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Gambar 3 Jumlah pengunjung domestik pariwisata Lombok Tengah 2017-2021



Sumber: Data BPS, diambil dari website pemerintah kabupaten Lombok Tengah

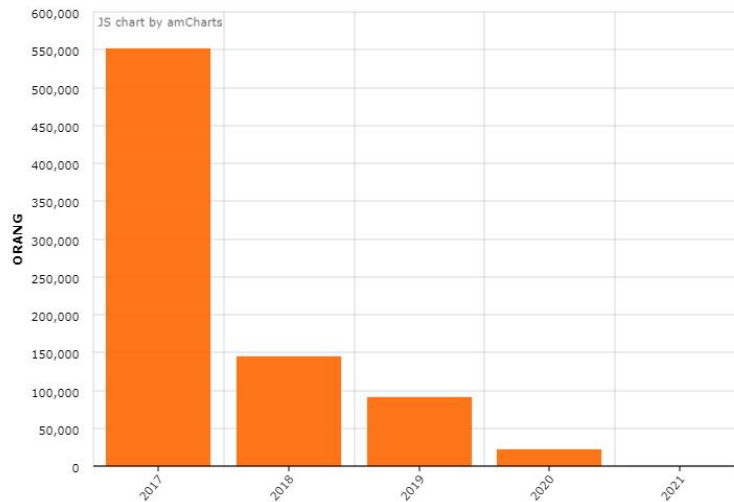
Berdasarkan data statistik di atas bahwa terjadi kenaikan yang cukup banyak dan signifikan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengikat mengenai vaksinasi memudahkan regulasi yang lain untuk bisa berjalan. Kemudahan akses transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan para pelaku wisata yang mengunjungi wisata yang ada di Lombok Tengah memberikan

tanggapan yang memuaskan khususnya mengenai kebijakan yang ada khususnya terhadap transportasi yang diberikan (Bidang IKP, 2021).

Data di atas menjadi penting untuk disampaikan menjadi latar belakang masalah penelitian ini dilaksanakan, karena kebijakan yang di ambil untuk menjadi evaluasi organisasi pemerintah kabupaten dalam hal ini aspek pariwisatanya. Karena tentunya kebijakan yang ada dipemerintahan pusat ikut mempengaruhi kebijakan daerah. Adanya regulasi perubahan serta kebijakan yang semakin melonggarkan menjadi salah satu alasan peningkatan jumlah pengunjung pariwisata domestik atau bahkan nasional.

Namun dalam pelaksanaannya sendiri dalam data pengunjung untuk pariwisata 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat pesat juga.

Gambar 4 Jumlah pengunjung wisata asing Lombok Tengah 2017-2021



Sumber: Data BPS, diambil dari website pemerintah kabupaten Lombok Tengah

Hal ini dikarenakan warga negara asing sampai pada tahun 2021 masih melaksanakan penyesuaian dengan negaranya serta dengan negara Indonesia. Serta pemenuhan syarat-syarat yang perlu disiapkan ketika hendak memasuki suatu negara, ditambah dengan kondisi perekonomian global yang mengalami krisis.

Kebijakan pariwisata Indonesia saat ini sedang mengalami proses pertumbuhan setelah terlaksananya *event* internasional yakni Idemitsu Asia Talent Cup (IATC), World Supersport (WSSP) dan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika Lombok. Hal ini menjadi suatu tahap awal promosi secara gratis karena para pembalap sekaligus pergi berlibur dengan menampilkan kondisi alam yang ada disana. Serta dengan adanya pawang hujan yang dilibatkan menjadi salah satu bentuk teknik marketing yang disiapkan pemerintahan pusat. Hal yang demikian juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang di ambil. Hal yang sudah dijalankan ini sendiri telah mendapatkan persetujuan mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Dari event ini saja PAD (Pedapatan Asli Daerah) yang dimiliki Lombok Tengah mengalami kenaikan yang awal mula 219 miliar menjadi 288 miliar (Ivan, 2021).

Kebijakan pemerintah pusat yang telah di ambil juga memiliki afiliasi dengan pemerintah daerah ataupun sebaliknya. Hal yang demikian ini mulai dari pemerintah provinsi kemudian pemerintah di tingkat kabupaten pun turut serta mendukung pelaksanaan WSBK ini. Hal yang demikian diharapkan dapat mengangkat potensi wisata yang lainnya juga. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan berupa sepanduk dan doa bersama untuk mensukseskan *event* besar tersebut.

Kebijakan mengenai pariwisata oleh Pemkab (pemerintah kabupaten) itu sendiri tidak banyak karena berapiliasi langsung dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Yakni Kuta Mandalika ditetapkan oleh PP No. 52 Tahun 2014. Kuta Mandalika menjadi salah satu program pembangunan prioritas. Hal ini kemudian menjadi salah satu konsen khusus pemerintah daerah bahkan pusat dalam menetapkan kebijakannya.

Menurut seluruh penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai latar belakang yakni kebijakan yang dibuat perlu adanya evaluasi kebijakan supaya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh dinas pariwisata khususnya pemerintah kabupaten Lombok Tengah mengenai kebijakan pariwisata masa pandemi pada tahun 2020-2021. Peneliti disini akan berfokus evaluasi kebijakan yang kemudian dipersempit mengenai kebijakan pariwisata yang ditetapkan di kabupaten Lombok Tengah terkait dengan kebijakan yang memfokuskan untuk mengembangkan pariwisata. Maka dari itu penelitian ini kemudian berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pariwisata Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam menjalankan organisasi khususnya dalam hal ini suatu pemerintahan memiliki evaluasi yang mana dapat mempengaruhi kebijakan yang diambilnya, atau begitupun sebaliknya. Namun walaupun suatu kebijakan telah dirancang sedemikian rupa serta adanya konsep perencanaan, tetap memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu dimunculkan rumusan masalah mengenai penelitian ini

yakni, Bagaimana evaluasi kebijakan pariwisata pemerintah kabupaten Lombok Tengah masa pandemi Covid-19 tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan organisasi dalam hal ini pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam sektor pariwisatanya pada tahun 2021-2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai evaluasi kebijakan pasca pandemi covid-19 ini. Serta kaitannya dengan kebijakan yang dibuat. Hal ini dimana menjadi sangat bersinggungan dengan aspek pembelajaran dari ilmu pemerintahan yang mengkaji tentang suatu lembaga atau organisasi serta kebijakan yang dibuatnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dengan penelitian-penelitian yang akan datang dalam mengkaji tentang evaluasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini bagi penulis adalah supaya penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di kelas sebelumnya secara lebih ilmiah melalui skripsi. Selain sebagai syarat kelulusan yang dilaksanakan untuk menempuh jenjang pendidikan program sarjana ilmu pemerintahan di Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah Daerah/ Dinas Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah yang selaku objek inti penelitian dapat mengetahui mengenai evaluasi kebijakan yang dijalankan dan bahkan bisa digunakan sebagai sebuah metode ilmiah dalam memberikan saran serta masukan untuk terus mengembangkan kebijakan menjadi semakin baik lagi. Karena memang penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pada saat pandemi dan perubahannya pada masa pandemi Covid-19. Serta untuk mengetahui kebijakan yang tepat dikeluarkan untuk sektor pariwisata yang ada disana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat kepada masyarakat yang mau menggunakan kajian ilmiahnya atau informasinya atau bahkan yang hanya membacanya supaya bisa digunakan sebagai media informasi, kajian akademik, atau bahkan kritik atau saran. Khususnya bagi masyarakat daerah Lombok Tengah. Kemudian yang lainnya sebagai media pembeding seputar lembaga daerah yang mereka dipimpin di dalamnya.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
-----------	--------------	----------------	--------------	-------------------------

1	<p>Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Samosir</p>	<p>Saputra, A., & Ali, K. (2020)</p>	<p>2020</p>	<p>Pada penelitian ini menghasilkan bahwa pengimplementasikan keputusan Bupati Samosir untuk mempermudah pariwisata yang ada disana. Tapi, adanya kendala untuk mendukung pengimplementasian kebijakan</p>
2	<p>Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga</p>	<p>Prasetyo, D. E., Damrah, D., & Marjohan, M. (2018)</p>	<p>2018</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yakni kebijakan pemerintah belum relevan dengan pengcab dan atlet. Kemudian pemerintah dalam sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Tebo belum relevan dengan kebutuhan pengca dan atlet. Selanjutnya manajemen organisasi belum relevan dengan pengcab dan atlet, dan terakhir adanya</p>

				<p>pemberian yang relevan mengenai penghargaan kepada pengcab dan atlet</p>
3	<p>Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu</p>	<p>Amirudin, A. (2017)</p>	2017	<p>Pada penelitian ini menghasilkan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pariwisata kolaboratif menghasilkan bentuk baru dalam pariwisata walaupun pada pelaksanaanya melibatkan masyarakat secara pasif</p>
4	<p>Optimaliasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Pariwisata Menuju Endemi Covid 19 Provinsi Bali</p>	<p>Wibawa, G. Y. S. (2022)</p>	2022	<p>Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pajak pariwisata memberikan pendapatan bagi pemerintah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Bali</p>

5	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa	Qodriyatun, S. N. (2019)	2019	Terjadi perubahan secara sosial masyarakat terkait pariwisata itu sendiri walaupun telah memberikan keuntungan secara ekonomi
6	Ecotourism Sebagai Adaptasi Kegiatan Pariwisata Pasca Pandemi	Kinanthi, M. (2022, July)	2022	Pada ecotourism sendiri dapat merespon masyarakat dalam aspek pariwisata pada masa pandemi. Kemudian penelitian ini penting untuk membuat peluang strategi baru untuk perencanaan pembangunan dan lingkungan pada masa pandemi Covid-19
7	Strategi Penguatan Daya Saing Pariwisata Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi	Pratama, D. A (2022)	2022	Penelitian ini menghasilkan bahwa Kabupaten Kuningan dikategorikan rendah dalam indeks daya saing karena kurang dari 1

	Kabupaten Kuningan Pasca Pandemi Covid-19			
8	Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya di Provinsi Maluku	Solemede, I., Tamaneha, T., Selfanay, R., Solemede, M., & Walunaman, K. (2020)	2020	Menghasilkan diperlukannya program Sapta Pesona untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Maluku
9	Strategi Pemulihan Potensi Wisata Pantai Tanjung Lampu Kampung Wailebet Di Kabupaten Raja Ampat Pasca Pandemi Covid-19	Wader, Z., Walansendow, J. A., & Ngenget, S. (2021)	2021	Menyimpulkan bahwa pada daerah Tanjung Lampu Kampung Wailebet Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi wisata yang alami serta adanya kebijakan pemerintah mengenai pola hidup pada masa normalisasi

10	Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19	Sari, R. A. P. (2022)	2022	Penelitian ini menghasilkan bahwa Kota Baru perlu untuk terus mngembangkan serta beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 ini mulai dari dinas sampe pemerintah daerahnya
11	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban	Mayangkara, A. P. (2016)	2016	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa penggunaan sistem controlled landfill untuk pengelolaan TPA Gunung Panggung belum memenuhi standar menurut UU
12	Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli	Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021)	2021	Dalam penelitian dihasilkan bahwa terjadi penurunan dalam retribusi, rekreasi, dan olahraga yang mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Daerah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid- 19			
13	Rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Kota Bandung	Herdiana, D. (2020)	2020	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa para pelaku usaha pada sektor pariwisata memiliki peran dalam memulihkan kondisi ekonomi yang diberikan pada masa pandemi Covid-19
14	Analisis dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata di objek wisata goa Pindul Kabupaten Gunung Kidul	Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021)	2021	Penelitian ini menghasilkan bahwa wisata pada Goa Pindul Gunungkidul mengalami dampak dari pandemi Covid- 19 yang menjadi wabah di seluruh dunia, yang mana berdampak besar pada pedagang yang ada disana

15	Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	Arisa, I. (2019)	2019	Penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah masih belum memiliki regulasi kebijakan kaitannya dengan pengembangan pariwisata yang ada disana. Hal ini berdampak pada tidak terkordinirnya wisata yang ada disana.
16	Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas Di Kota Surakarta	Maharani, N. A. (2022)	2022	Hasil penelitian menghasilkan bahwa pariwisata berbasis komunitas yang dijalankan di Kota Surakarta terbentuk karena potensi pariwisata yang ada, yang mana hal ini juga didukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang ada disana.
17	Implementasi Kebijakan	Hura, M. A. (2020)	2020	Hasil dari penelitian yang dilaksanakan menghasilkan

	Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias			bahwa pengembangan pariwisata di kawasan Soziona erjalan dengan baik tapi masih ada variabel yang tidak berjalan secara maksimal
18	Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah	Akbar, M. F. (2016)	2016	Bahwa dalam penelitian ini menghasilkan bantuan dana operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju bisa dikatakan cukup baik serta perlu adanya tindak lanjut walaupun adanya kekurangan-kurangan dalam pelaksanaanya yang masih perlu di evaluasi
19	New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan	Mutiarin, D., Utami, S., & Damanik, J. (2021)	2021	Penjelasan dalam penelitian ini menggunakan twitter sebagai media untuk diteliti menghasilkan penelitian yang dilakukan di dalam twitter belum bisa menjelaskan secara

	<p>Penanganan Dampak Covid-19: New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19</p>			<p>penuh mengenai kebijakan yang dilaksanakan, kebijakan yang diteliti antaranya regulasi kebijakan serta dampaknya menghadapi masa pandemi Covid-19</p>
20	<p>Kebijakan Pariwisata Lombok untuk Melepaskan Ketergantungan Terhadap Pariwisata Bali Menuju Pariwisata Internasional</p>	<p>Karjaya, L. P., Mardialina, M., & Hidayat, A. (2018)</p>	2018	<p>Dalam penelitian ini menemukan bahwa potensi pariwisata yang ada di Lombok begitu besar dan menjanjikan namun harus adanya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan atau membuat potensi yang ada secara baik</p>

Sumber: Didapatkan dari olah dan pemilihan dari berbagai sumber

Kajian literatur di atas menjadi salah satu referensi serta pembelajaran dalam mewujudkan penelitian ini. Tidak kalah penting adalah mengenai keterkaitan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan di atas. Bahwa dari total 20 referensi di atas 3 diantaranya membahas tentang evaluasi kebijakan. Letak hubungannya adalah 18 di antaranya berfokus pada kebijakan pemerintah pusat atau daerah atau bahkan dinas terkait, kebijakan pariwisata yang mana penelitian ini juga berkaitan langsung dengan kebijakan pariwisata. Serta pada penelitian di atas juga konsen terhadap kebijakan pariwisata yang diambil. Mulai dari promosi kebijakan, strategi kebijakan, kebijakan dalam pengentasan pandemi, sampai pada pengembangan kebijakan. Hal yang demikian akan memiliki pengaruh serta menjadi perbandingan atau bahkan rujukan dalam mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

Kemudian rincian penelitian di atas dampak Covid yang dihadapi tertera hampir semua kajian literatur di atas, bersinggungan dengan masa pandemi Covid-19 sekarang ini terjadi. Walaupun tidak langsung disampaikan dalam judul penelitian di atas. Nyatanya dalam isi penelitian di atas, karena objek penelitian di atas masyarakat yang terkena dampak dari pandemi yang terjadi. Jadi tetap akan membahas serta menyinggung pandemi yang terjadi, yang mana pada penelitian yang akan dilaksanakan ini akan membahas tentang masa Covid-19 yang terjadi pada sampai transisi endemi. Jadi akan sangat *relate* (berhubungan) dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Rincian selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan ekonomi, yang mana berkaitan dengan pariwisata yang ada. Jadi tidak bisa dikatakan tidak berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan dengan dampak covid yang terjadi. Hanya saja dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada dengan aspek pariwisata sebagai rujukan dalam membangun perekonomian.

Selanjutnya adalah jurnal internasional yang mana ketiga di antaranya membahas tentang perbandingan organisasi terhadap perilaku organisasi yang ada, kemudian motivasi organisasi dalam perilaku organisasi yang dijalankan, dan kemudian adanya pengaruh budaya organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan pembahasan inti penelitian ini. Yakni, mengenai evaluasi kebijakan namun dalam aspek pariwisatanya.

Semua kajian pustaka di atas, diharapkan dapat menjadi rujukan serta pustaka dalam menjalankan penelitian ini. Karena semua kajian pustaka di atas, memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Supaya bisa mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada organisasi dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi penting untuk ada supaya dapat menjadi limitasi dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan nantinya bisa terukur serta terarah dalam pelaksanaannya.

1. Teori Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Dalam melaksanakan proses kebijakan terlebih dahulu perlu diketahui mengenai kebijakan itu sendiri. Pengertian kebijakan dari menurut Dr. Taufiqurokhan, S.Sos., M.Si dalam bukunya yakni Kebijakan Publik (2014) yang dimana diambil inti sari dari teori menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip dari Leo Agustino yakni “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiata yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” dijelaskan menjadi, bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Selanjutnya dalam mendefinisikan sebuah kebijakan dalam buku Analisis Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. Joko Widodo, M.S (2021:11) diberikan beberapa definisi kebijakan yakni berdasarkan maksud dan tujuan:

1. Tindakan atau non-aksi dalam menanggapi tuntutan (Stuart H. Rakoff dan Guenther F. Schaefer)
2. Serangkaian keputusan yang saling terkait. yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan ini

pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk mencapainya” (W.I Jenkins)

3. Program nilai dan praktik tujuan yang diproyeksikan (Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan)
4. Kebijakan adalah, dalam pengertian yang paling umum, pola tindakan yang menyelesaikan klaim yang saling bertentangan atau memberikan insentif untuk kerjasama (Fred M. Frobook).

Untuk mempersempit konteks kebijakan memerlukan batasan yakni peneliti akan konsen terhadap kebijakan publik.

b. Jenis Kebijakan

1. Kebijakan Publik (Public Policy)

Kebijakan publik sendiri secara harfiah terbagi menjadi 2 (dua) kata yakni kebijakan (policy) dan publik (public) yang mana dalam *Black Law Distionary* dalam buku Pengantar Kebijakan Publik (Hermanto Suaib et al., 2022) dijelaskan bahwa kata publik di artikan sebagai:

1. Berhubungan atau menjadi bagian dari seluruh komunitas, negara bagian, atau bangsa
2. Terbuka atau tersedia untuk digunakan, dibagikan, atau dinikmati semua orang; dan
3. (Dari sebuah perusahaan) yang memiliki saham yang tersedia di pasar terbuka

Kemudian dijelaskan juga mengenai kebijakan itu sendiri yakni:

1. *The general principles by which a government is guided in its management of public affairs* (Prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah dalam pengelolaan urusan publiknya)
2. *A document containing a contract of insurance*; dan (Sebuah dokumen yang berisi kontrak asuransi; dan)
3. *A type of lottery in which bettors select numbers to bet on and place the bet with a policy writer* (Jenis lotere di mana petaruh memilih nomor untuk bertaruh dan memasang taruhan dengan penulis kebijakan)

Kemudian diakumulasikan menjadi kebijakan publik yang sudah direlevansikan menjadi kebijakan publik adalah suatu prinsip dan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara (Suaib, Hermanto et al., 2022: 8).

2. Proses Kebijakan

Pada prosesnya kebijakan publik terlahir dari aktivitas sebelumnya (Widodo, 2021) yakni diantaranya:

- a. Masalah dirumuskan
- b. Agenda kebijakan ditentukan
- c. Kebijakan dirumuskan
- d. Keputusan kebijakan di ambil
- e. Kebijakan dilaksanakan
- f. Kebijakan dievaluasi

Hal yang demikian aktivitas yang sudah dijalankan dalam proses kebijakan. Ditambahkannya juga bahwa adanya pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk kepentingan proses kebijakan ketika akan diterapkan.

3. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan yang merujuk pada buku Analisis Kebijakan Publik (2022) maka diperoleh 4 (empat) tahapan dalam pelaksanaannya. *Pertama*, analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif, yakni berkaitan dengan *learning and activity*. *Kedua*, analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. *Ketiga*, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Hal ini mengartikan bahwa masalah yang dikaji perlu adanya aktivitas dari sejumlah analisis. Dan yang *keempat*, analisis kebijakan berkaitan dengan masalah publik (*public problem*). Adanya batasan yang menentukan suatu itu dikatakan sebagai masalah publik bahkan bila mencangkup sejumlah orang. Mudahnya masalah publik berupa dampak terhadap masyarakat yang berkepentingan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

2. Teori Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pengertiannya sendiri evaluasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kegagalan dalam suatu program atau kebijakan yang dijalankan supaya bisa terwujudnya apa yang dicita-citakan pada perencanaan kebijakan sebelumnya (Situmorang, 2016). Sedangkan pendapat dari Muhadjir dalam Fitrianto (2020) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menilai kegunaan dari kebijakan yang telah digunakan, hal

demikian dapat dilakukan dengan cara perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang sudah dicapai.

Ternyata dalam teorinya evaluasi kebijakan memiliki berbagai tipe yang di kutip Situmorang (2016) dari pendapat James Anderson yakni:

1. Evaluasi kebijakan yang bersifat fungsional
2. Evaluasi kebijakan bersifat berfokus pada kinerja sebuah kebijakan
3. Evaluasi kebijakan bersifat sistematis

Evaluasi kebijakan juga dalam pelaksanaannya memiliki langkah-langkah evaluasi kebijakan yang Situmorang (2016) ambil dari pendapat Edward A. Suchman yakni langkah-langkahnya: identifikasi terhadap tujuan yang ingin dicapai program, melakukan analisis terhadap permasalahan, penjelasan serta membuat standar kegiatan, memberikan pengukuran terhadap perubahan yang dilakukan, menentukan sebab yang menjadikan adanya perubahan, dan yang terakhir adalah membuat indikator kemunculan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya ditambahkan bahwa tahap yang paling krusial adalah mengenai pengidentifikasian terhadap masalah.

Orang yang melaksanakan evaluasi dinamakan evaluator, yang mana evaluator dalam menjalankan evaluasi memiliki 3 unsur yang harus dilaksanakan diantaranya: memberikan penjelasan terhadap hasil kebijakan yang telah dilaksanakan, selanjutnya suatu evaluasi kebijakan menilai atau memperbaiki masalah sosial yang terjadi, dan yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan setiap akibat bentuk dari reaksi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Situmorang, 2016).

Serta lebih jauh juga dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan juga memiliki lima dimensi. Kelimanya tersebut adalah: 1) dampak kepada masalah publik, 2) dampak pada orang yang ada di dalamnya, 3) dampak kepada di luar daripada kebijakan yang menjadi sasaran, 4) dampak kepada situasi saat ini dan dampak kepada masa yang akan datang, 5) serta biaya yang secara tidak langsung dibebani kepada masyarakat.

Serta dijelaskan pula menurut Anderson yang dikutip dari Situmorang (2016) menjelaskan bahwa masalah-masalah kebijakan terdiri dari:

- a) Ketidakpastian terhadap tujuan kebijakan
- b) Kausalitas yakni prinsip tentang sebab-akibat tentang pengetahuan tanpa perantara ilmu lain
- c) Adanya penyebaran dampak dari kebijakan yang mana maksud disini adalah diluar dari pada kelompok yang menjadi sasaran
- d) Sulitnya mendapatkan data dalam pelaksanaan evaluasi
- e) Resistensi pejabat yang seharusnya berpikir objektif
- f) Adanya evaluasi dapat mengurangi dampak sehingga berpotensi diabaikan

Mengevaluasi sebuah kebijakan diperlukannya suatu indikator dalam mengidentifikasi suatu kebijakan tertentu. Kemudian diambil 5 indikator kriteria evaluasi dari Subarsono dikutip dari Damanik & Marom (2016) yakni:

1. Efektivitas yakni dijelaskan mengenai kesesuaian hasil telah tercapai atau tidak

2. Pemerataan dijelaskan mengenai biaya dan manfaat didistribusikan sesuai dan merata kepada suatu kelompok masyarakat sasaran atau non-sasaran
3. Responsivitas dijelaskan bahwa adanya hasil kebijakan memberikan kepuasan kelompok
4. Ketepatan bahwa dijelaskan kebermanfaatan kebijakan yang telah dibuat
5. Kecukupan dijelaskan yakni kebijakan yang telah dibuat diukur dengan hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah

3. Teori Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Selain dari teori-teori tentang kebijakan di atas, maka perlu juga dijelaskan mengenai definisi yang tepat tentang pariwisata. Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk pergi bersantai atau berpariwisata, yang tidak berkeinginan untuk mencari kebutuhan ekonomi, hanya menikmati perjalanan atau menikmati suatu tempat tertentu dalam rangka memenuhi keinginan (Suryani, 2017). Secara penerjemahan perkata dalam bahasa sangsekerta yang dibagi menjadi dua suku kata yakni kata “pari” yang berarti penuh, kemudian kata “wisata” yang berarti perjalanan. Sehingga dapat diartikan menjadi suatu persinggahan atau perjalanan untuk tujuan tertentu (Suryani, 2017).

Untuk bisa memahamai lebih jelas mengambil pendapat dari Yoeti dikutip dari Suwena & Widyatmaja (2017) dijelaskan secara penyebaran kata sebagai berikut:

1. Wisatawan = yakni diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan
2. Wisata = diartikan sebagai perjalanan
3. Para wisatawan = diartikan sebagai kumpulan orang yang melakukan perjalanan
4. Pariwisata = diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan menuju tempat yang lain
5. Para pariwisataawan = diartikan sebagai melakukan perjalanan *tour*
6. Kepariwisataan = diartikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pariwisata

b. Faktor Penting Pariwisata

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pengertian kepariwisataan memiliki faktor penting diantaranya:

1. Perjalanan pariwisata dilakukan dalam waktu sementara
2. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat menuju tempat yang lain
3. Perjalanan itu dilakukan dalam rangka atau harus ada unsur rekreasi
4. Perjalanan dilakukan tanpa ada unsur mencari nafkah

c. Jenis dan Macam Pariwisata

Kepariwisataan sendiri memiliki jenis serta macam pariwisata menurut Suwena & Widyatmaja (2017) berdasarkan letak geografis:

1. Pariwisata lokal, meliputi suatu tempat yang lebih sempit dalam tempat tertentu saja

2. Pariwisata regional, yaitu pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah tertentu yang mencakup wilayah nasional dan internasional. Contoh kepariwisataan Bali, Lombok, Yogyakarta, dan lain-lain
3. Pariwisata nasional yang cangkupannya nasional tapi mencakup orang regional tapi juga internasional yang menetap di wilayah tersebut
4. pariwisata regional-internasional yang terbatas yang cangkupannya internasional namun terbatas yang melewati dua atau tiga negara dalam suatu wilayah tertentu.
5. pariwisata internasional yakni suatu pariwisata yang dikembangkan oleh berbagai negara

Selanjutnya menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

1. Pariwisata aktif yakni cirinya adanya wisatawan masuk ke suatu negara, ini akan berkaitan dengan pendapatan suatu negara yang dimasuki
2. Pariwisata pasif yakni wisatawan dalam negeri keluar berwisata ke luar negeri

Menurut alasan atau tujuan perjalanan

1. *Business tourism* yakni wisatawan pergi untuk tujuan dinas
2. *Vacational tourism* yaitu wisatawan yang datang dengan alasan sedang cuti/libur atau sebagainya
3. *Educational tourism* yakni wisatawan dengan tujuan untuk belajar

4. *Familiarization tourism* yakni mengenal daerah yang akan dikunjungi untuk pekerjaan

5. *Scientific tourism* yakni untuk mengetahui atau menyelidiki tentang suatu ilmu tertentu

6. *Special Mission tourism* yakni perjalanan wisatawan dengan tujuan khusus

7. *Hunting tourism* yakni dengan tujuan untuk perburuan binatang

Menurut saat atau waktu berkunjung

1. Pariwisata yang dilakukan pada musim tertentu (*Seasonal tourism*)

2. Pariwisata disesuaikan dengan suatu kegiatan tertentu (*Occasional tourism*)

Menurut objeknya:

1. Pariwisata dengan alasan seni dan budayanya (*Cultural tourism*)

2. Pariwisata dengan tujuan menyembuhkan suatu penyakit (*Recuperational tourism*)

3. Pariwisata dengan berkaitan dengan perdagangan nasional dan internasional (*Commercial tourism*)

4. Melakukan pariwisata dengan alasan menyaksikan olahraga (*Sport tourism*)

5. Pariwisata yang tujuan berhubungan dengan suatu negara (*Political tourism*)

6. Pariwisata yang menekankan untuk keuntungan (*Social tourism*)

7. Pariwisata dalam tujuan melihat upacara keagamaan (*Religion tourism*)

8. Pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk menyelam, berenang dan lainnya (Marine tourism)

G. Definisi Konseptual

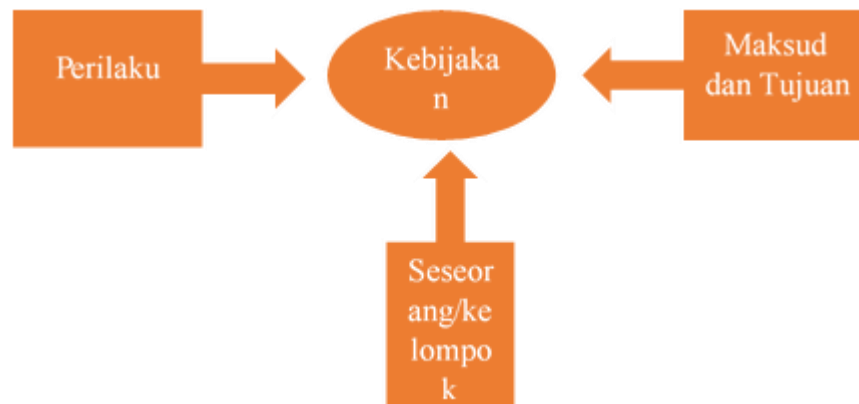
Setelah penjelasan mengenai teori serta konseptualitas di atas dijelaskan maka diperoleh hasil pemikiran definisi konseptual menurut peneliti sebagai berikut:

1. Kebijakan

Berdasarkan pengertian dari pada peneliti sebelumnya serta akumulasi dari berbagai pendapat maka dapat diambil satu garis penghubung mengenai penelitian yang dilakukan yakni kebijakan merupakan rangkaian dari sebuah maksud dan tujuan berupa perilaku dari seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dalam suatu wilayah yang dinyatakan sah.

Kebijakan berdasarkan pengertian di atas dapat digambarkan memiliki beberapa komponen dalam pembentukannya yakni:

Gambar 5 Komponen Pembentuk Kebijakan



Sumber: Hasil rumusan peneliti

Bahwa maksud dari rumusan peneliti di atas, semua aspek yang digabungkan untuk bisa menghasilkan sebuah definisi kebijakan itu sendiri.

2. Evaluasi kebijakan

Sedangkan untuk evaluasi kebijakan didefinisikan berdasarkan teori yang disampaikan oleh beberapa ahli bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan supaya target yang ingin dicapai bisa terpenuhi walaupun adanya kesalahan yang terjadi. Kebijakan secara menyeluruh yang akan di pantau serta diberikan evaluasi terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

3. Pariwisata

Berdasarkan definisi di atas teori pariwisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama (berkelompok) atau secara sendiri dan pergi ke suatu tempat tanpa alasan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang hendak dicari, tapi hanya bersenang-senang atau memuaskan diri terkait sesuatu.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi penting untuk disampaikan supaya penelitian menjadi punya batasan dalam pelaksanaannya, serta supaya penelitian tidak terlalu luas untuk diteliti. Maka penting dalam penyampaian terkait definisi operasional dalam penelitian ini. pelaksanaan penelitian ini sendiri memiliki unsur-unsur pembentuk

supaya dalam pengimplementasiannya nanti memiliki tolak ukurnya sendiri. Hal ini juga yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengetahui evaluasi kebijakan pariwisata yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian untuk membantu peneliti dalam memberikan definisi operasional serta untuk memberikan batasan kebijaka yang dievaluasi dengan menggunakan 5 indikator kriteria evaluasi dari Subarsono dikutip dari Damanik & Marom (2016) berdasarkan kerangka teori yang disampaikan di atas terkait kebijakan, evaluasi kebijakan dan pariwisata.

Tabel 2 Tabel indikator atau kriteria evaluasi kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan atau Indikator
1	Efektivitas	Kesesuaian hasil telah tercapai atau tidak
2	Pemerataan	Biaya dan manfaat didistribusikan sesuai dan merata kepada suatu kelompok masyarakat sasaran atau non-sasaran
3	Reseponsivitas	Adanya hasil kebijakan memberikan kepuasan kelompok
4	Ketepatan	Kebermanfaatan kebijakan yang telah dibuat

5	Kecukupan	Kebijakan yang telah dibuat diukur dengan hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah
---	-----------	---

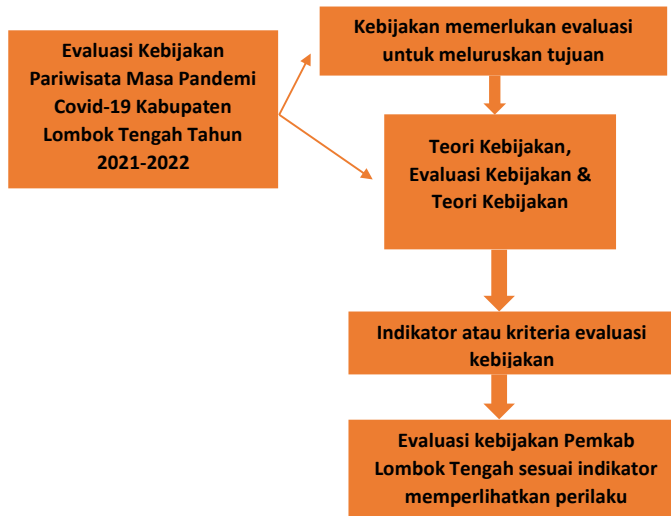
Sumber: jurnal Damanik & Marom (2016), diolah peneliti

Hal yang menjadi indikator di atas kemudian yang akan digunakan sebagai barometer dalam mengevaluasi kebijakan dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

I. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) dikutip dari penelitian sebelumnya (Validitas et al., 2019) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Maka dari itu disini perlu adanya penjelasan mengenai kerangka berpikir penelitian ini.

Gambar 6. Kerangka Berpikir Peneliti



Sumber: Rumusan Peneliti

Kerangka berpikir di atas dibuat berdasarkan perencanaan riset yang akan dijalankan oleh peneliti, yakni mulai dari penentuan suatu masalah kemudian menemukan judul yakni “Evaluasi Kebijakan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2022”. Selanjutnya menggunakan teori yang sesuai, dapat membatasi penelitian sehingga tidak terlalu melebar dari apa yang dijalankan. Kemudian menentukan indikator pelaksana evaluasi kebijakan yang nantinya digunakan sebagai standarisasi kebijakan. Pada beberapa aspek penilai yang sudah peneliti jelaskan di atas nantinya akan menimbulkan hasil penelitian yang mencakup evaluasi kebijakan pariwisata yang dijalankan.

J. Metode Penelitian

Sangat penting untuk menentukan metode penelitian yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tentunya dengan mengedepankan aspek rasionalitas serta

sistematika dalam proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya nanti peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dipadukan dengan model Spradley. Untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dipadukan dengan model Spradley yang mana akan 12 (duabelas) langkah dalam pelaksanaannya. *Pertama*, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (key informant) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti menuju objek penelitian. *Kedua*, peneliti melakukan wawancara. *Keempat*, perhatian peneliti pada objek penelitian, dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. *Kelima*, dilanjutkan dengan analisis terhadap wawancara (Wijaya, 2014) yang diambil dari pendapat Sugiyono (2014).

Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya. *Keenam*, peneliti melakukan analisis domain. *Ketujuh*, peneliti sudah menentukan fokus. *Kedelapan*, melakukan analisis taksonomi, *Kesembilan* peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang *Kesepuluh*, dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial. *Kesebelas*, peneliti menemukan tema-tema budaya. *Keduabelas*, Selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian etnografi. Proses penelitian dimulai dari pemikiran yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi (Sugiyono, 2014:347).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan tentang pariwisata yakni di Dinas Pariwisata. Hal ini sesuai dengan rencana penelitian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai *key informant* (informan kunci). Serta kepada objek kebijakan yang menikmati pariwisata.

3. Jenis Data Penelitian

Secara umum ada dua jenis data yang akan digunakan yakni:

1. Data Primer

Data primer menurut Sekaran dan Bougie (2016), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu yang dikutip juga dalam buku Mahfud & Ghaniy (2021). Jadi dapat diartikan bahwa data primer merupakan data langsung yang didapatkan oleh peneliti ketika sedang meneliti. Maka dalam pelaksanaannya nanti sendiri peneliti akan langsung menemui *key informant* dalam penelitian ini yakni bidang kepala bidang Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan/atau yang sesuai tugas terkait kebijakan pariwisata yang dikeluarkan kemudian yang akan memberikan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya nanti bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, survey dan lainnya. Metode-metode yang disebutkan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta situasi dalam melaksanakan penelitian ini. Untuk data primer ini bisa berupa memo, surat, berkas (softfile atau hardfile), peraturan, naskah dan lain sebagainya (Mahfud & Ghaniy, 2021).

Tabel 3 Tabel bentuk sumber data primer

No	Indikator Data	Sumber Data	Penjelasan	Jumlah
1	Key person	Kepala dinas pariwisata dan/atau bidang terkait kebijakan	Yang mengeluarkan kebijakan di daerah Kabupaten adalah Dinas Pariwisata Lombok Tengah sehingga dikatakan sebagai key person (orang kunci) atau sumber utama terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan	1
2	Pelaku pariwisata yang bergerak untuk perekonomian	Pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang melengkapi	Karena yang merasakan efek atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan serta	5

		sektor pariwisata dalam aspek ekonominya	menjadi penyedia dan pelengkap dalam pariwisata yang ada	
3	Pengunjung pariwisata	Pengunjung pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah	Pengunjung pariwisata menjadi objek kebijakan secara langsung dari kebijakan yang dibuat	5
4	Stekholder terkait	Instansi atau orang yang memiliki hubungan kerja sama dengan dinas pariwisata	Stekholder menjadi penting untuk ditambahkan karena memiliki hubungan langsung dengan dinas objek kajian	1

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) (Moh, 2021). Sama halnya dengan data primer untuk bagian bentuk dari data sekunder bisa berupa memo, surat, berkas (softfile atau hardfile), peraturan dan lain sebagainya. Namun yang membedakan adalah pihak yang pertama kali mendapatkan data tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya juga akan diperjelas, diperdalam, ditambahkan dengan studi pustaka lainnya. Demi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan arah penelitian.

Tabel 4 Tabel sumber data primer

No	Indikator Data Sekunder	Sumber Data Sekunder	Alasan
1	Data sekunder softfile	Kajian atau penelitian atau buku sebelumnya berupa softfile	Sebagai data pendukung dalam memahami maksud dari narasumber
2	Data sekunder hardfile	Kajian atau penelitian atau buku sebelumnya berupa hardfile	Sebagai data pendukung dalam memahami maksud dari narasumber

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang baik dalam penelitian kualitatif menurut Milles dan Hubberman (dalam Moh, 2021) 3E yakni:

1. Experiencing, pengumpulan data yang diambil dari pengalaman objek peneliti

Yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengalaman objek penelitian bisa diambil dari informan kunci bisa juga diambil dari pelaku pariwisata ataupun objek kebijakan itu sendiri.

2. Enquiring, pengumpulan data melalui pertanyaan peneliti

Dalam pelaksanaannya sendiri nanti akan melakukan wawancara dengan yang menjadi objek penelitian.

3. Examining, pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan yang berupa data arsip, jurnal dan sebagainya yang terkenal dengan studi dokumen.

Dalam mengumpulkan data segala bentuk alat yang digunakan mencatat atau mendokumentasikan dikumpulkan dan digunakan sebagai instrumen dalam menentukan hasil penelitian.

Hal yang demikianlah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Pengolahan data yang akan dilaksanakan oleh peneliti nantinya mencakup 5 langkah pelaksanaan berdasarkan buku Moh (2021) dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, semua data yang dicari dan dikumpulkan. Peneliti nantinya sudah melaksanakan klasifikasi awal secara umum.
2. Tahap reduksi data, yakni peneliti melakukan seleksi data serta memfokuskan dan menyederhanakan data dari data yang dikumpulkan sebelumnya. Data yang tidak sesuai atau data yang tidak diperlukan perlu dipisahkan serta nanti berkaitan dengan data yang akan digunakan diklasifikasikan menjadi lebih spesifik.
3. *Display*, yakni penyajian data yang kemudian bisa disajikan dalam bentuk matriks atau tabel-tabel yang diperlukan
4. Hipotesis (kesimpulan sementara), menguji kembali dengan menggunakan triangulasi yakni 1. Wawancara secara mendalam, 2. Observasi, dan 3.

Dokumentasi

Kesimpulan, yakni membuat hasil akhir yang sesuai dengan data yang didapatkan dari suatu masalah yang diteliti dalam pembahasan kualitatif deskriptif.